

**PANDANGAN *FIQIH SIYASAH* TENTANG PERAN DAN FUNGSI
PENDAMPING DESA PEMBERDAYA (PDP)
DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA
(Studi di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi
Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

HIPZONI

NPM :1421020078

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019**

ABSTRAK

Undang-undang No. 6 tahun 2014 merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas peraturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan badan usaha milik desa, kelembagaan desa serta pembinaan dan pengawasan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan dituangkan dalam Peraturan Kementerian Desa No 3 Tahun 2015, pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini. 1).Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya dalam implementasi Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Cukuh Balak. 2).Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya tersebut ?. tujuan penulisan skripsi ini yaitu mengetahui Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya terhadap implementasi Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya tersebut. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Metode pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi, 3). Observasi. Fokus kajian adalah peran dan fungsi pendamping desa dalam implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan temuan di lapangan peran pendamping sudah berjalan sesuai dengan undang-undang hanya saja belum maksimal sepenuhnya, ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan peran pendamping tesebut seperti : jarak tempuh pekon dampingan, bnyaknya pekon yang harus didampingi, oprasional yang kurang diperhatikan, dan efektivitas waktu. Dalam kajian *piqih siyasah* Peran pendamping desa dalam mengimplementasikan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan bentuk taat terhadap pemimpin karna undang-undang merupakan prodak yang di buat pemimpin untuk kemaslahatan ummat sesuai dengan kaidah piqih “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Sama halnya di kecamatan cukuh balak peran pendamping sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi belum maksimal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **HIPZONI**

NPM : **1421020078**

Jurusan : **Siyasah Syar'iyah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi :

**PANDANGAN FIKIH SIYASAH TENTANG PERAN
DAN FUNGSI PENDAMPING DESA PEMBERDAYA
(PDP) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kecamatan
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H

Eko Hidayat, Sos., M.H

NIP: 196210221993031002

NIP: 197512302003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

NIP: 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA PEMBERDAYA (PDP) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”** disusun oleh **HIPZONI NPM 1421020078** jurusan **Siyasah Syar’iyyah**

Tetelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2019

Jam : 10.00-12.00 WIB

Tempat : Ruangan Laboratorium Dekanat FS Lt. 1

TIM DEWAN PENGUJI

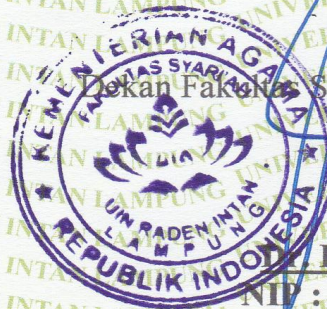
Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H** (.....)

Sekretaris : **Fathul Mu’in, S.H., M.Hi** (.....)

Penguji utama : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag** (.....)

Penguji pendamping I : **Dr. H. Khairuddin, M.H** (.....)

Penguji pendamping II : **Eko Hidayat, Sos., M.H** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

H. Khairuddin, M.H

NIP : 196210221993031002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”,
(QS. Al-Mudatstsir: 38)



PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta Mat Rais am dan Maspiah yang telah membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Kakak-kakak ku, Asnaini, Al-ma'arif, Hikmaria, dan adik-adik ku, Nova Sintia, Aldi Kurnia Saputra dan seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa;
3. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;
4. Seseorang yang selalu menemani, terus memberikan semangat, dukungan serta arahan;
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Hipzoni, dilahirkan di Pekon Suka Raja Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 26 oktober 1995. Peneliti adalah anak empat (4) dari enam (6) bersaudara. Terlahir dari pasangan yang harmonis dan selalu bahagia yaitu Bapak Mat Rais dan Ibu Mas Piah.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Banjar Negeri dan selesai pada tahun 2008. Lanjut pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus selesai tahun 2011. Kemudian lanjut ke pendidikan Madrasah Aliah Negeri 2 (MAN 2) Tanjung Katang, dan selesai pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di jurusan Siyasah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2014. Sementara pengalaman berorganisasi peneliti aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah. Peneliti diberi amanah dan tanggung jawab di HMI sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Priode 2017-2018.

Bandar Lampung 31 Juli 2019

HIPZONI
NPM : 1421020078

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji syukur serta terimakasih yang tiada terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan atas skripsi ini yang berjudul “Pandangan Piqih Siyasah Tentang Perana Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya (Pdp) Terhadap Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Cukuh Balak, kabupaten Tanngamus, Provinsi Lampung” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba;
2. Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebaikan;
3. Bapak Dr.H.Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr.H. Khairuddin Tahmid selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
5. Ibu Dr. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Siasah Sar’iyah
6. Bapak Prengky, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Siasah Sar’iyah
7. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H dan bapak Eko Hidayat. Sos., M.H, selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang

telah membentangkan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini
10. Meiva Ursyida.,S.H, Krismanik Aji Chandra.,S.H, Deni Ariska.,S.H Anugrah Yudha Purtawan.,S.E, Rhido Firdaus, Abdullah Majid Andriansyah.,S.H yang selalu menemani dalam penulisan serta memberikan nasihat dan motivasi.
11. Kandaku, Hermansyah.,S.H.,M.H, Najih Mustopa.,S.H, M.Pd, M. Agus Budiantoro.,S.H, Husni Mubarak.,S.H., Septiawan Rosa, Aji Purwadi S.H., Dirga Santosa.,S.H, Qistosi S.H., dan HMI komisariat syariah yang telah banyak memberiku ilmu dan pengalaman selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang penulis miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar lampung, 15 juli 2019
Penulis

HIPZONI
Npm : 1421020078

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	17
2. Objek Kajian Fiqih Siyasah.....	20
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	22
B. Siyasah Dusturiyah.....	24
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	24
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	25
3. Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah.....	28
C. Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) menurut perundang-undangan.....	44
1. Pengertian pendamping desa pemberdaya.....	44
2. Peran dan fungsi pendamping desa.....	46
3. Tujuan dibentuknya pendamping desa.....	49
4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	50
 BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Keadaan Umum kecamatan Cukuh Balak.....	54
1. Sejarah Singkat kecamatan Cukuh Balak.....	54
2. Visi dan Misi kecamatan.....	62
3. Letak Geografis Kecamatan Cukuh Balak.....	63
4. Wilayah Administratif Kecamatan Cukuh Balak.....	64
5. Data Monografi Kecamatan Cukuh Balak.....	65
B. Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya Di Kecamatan Cukuh Balak.....	76

BAB IV ANALISIS

- A. Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya Terhadap Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Cukuh Balak..... 94
- B. Pandangan Piqih Siyasah Terhadap Pran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya Di Kecamatan Cukuh Balak..... 96

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 99
- B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: **PANDANGAN *FIQIH SIYASAH* TENTANG PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA PEMBERDAYA (PDP) TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut diatas maka saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul ini antara lain sebagai berikut :

Fiqih Siyasah, adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹ *Fiqih siyasah* merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h.4.

Pendamping Desa, adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.²

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.³ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas peraturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dana desa, pembangunan desa dan badan usaha milik desa, kelembagaan desa serta pembinaan dan pengawasan desa.⁴

Maksud dari judul skripsi ini adalah mengungkap dan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya dalam mengimplementasikan undang-undang no 6 tahun 2014 ditinjau dari *piqih siyasah*. Sebagaimana diketahui bahwa adanya Pendamping Desa merupakan wujud implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini

² PERMENDES PDTT No. 3 Tahun 2015

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa

dibuat dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Fokus penelitian ini yaitu pada Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan saya memilih dan menetapkan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk membangun dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Peran dan fungsi pendamping Desa dalam mendampingi Desa untuk mengimplementasikan undang-undang no 6 tahun 2014 sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mencapai secara maksimal tujuan dari Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana peran dan fungsi pendamping desa Pemberdaya dalam menjalankan tugas membantu Desa mengimplementasikan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa untuk dapat memberikan kemajuan melalui proses Pemberdayaan di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan tentang pandangan *fiqih siyasah* mengenai perandan fungsi pendamping desa pemberdaya dalam implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum jurusan *Siyasah*. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.⁵

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Secara historis, sebagai masyarakat hukum, desa dibangun melalui prinsip kedaulatan rakyat, desa merupakan basis kearifan lokal mempunyai aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan dan hubungan sosial, serta desa merupakan basis sumberdaya alam berikut pegelolaannya. Desa merupakan tata pemerintahan yg paling awal yang telah ada lebih dulu sehingga merupakan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang yang memeiliki tata pemerintahan tertua sudah seharusnya desa menjadi ujung

⁵Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 1

tombak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas peraturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan badan usaha milik desa, kelembagaan desa serta pembinaan dan pengawasan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masarkat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 131 dijelaskan bahwa Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Pembangunan

Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa melalui kewenangan masing-masing.⁶

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kementerian Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dengan tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

⁶Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa*

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.⁷

Dengan di tetapkan undang undang-tentang desa, dan peraturan pelaksana undang-undang desa serta peraturan tentang Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) diharapkan mampu menciptakan masarakat desa yang unggul dan mandiri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmiggrasi Republik Indonesianomor 3 tahun 2015 pasal 1 ayat 14 menjelaskan, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa dalam mewujudkan visi misi desa.

Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Reublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Juga Menjelaskan tugas pendamping desa pada pasal 11 dan 12 yaitu Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksana tugas mendampingi Desa, meliputi:

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, *Op.cit.*

1. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam modul Program Inovasi desa (PID) menjelaskan Pendamping Desa memiliki beberapa fungsi yaitu,⁸

1. Fungsi *telling*, yaitu situasi masyarakat yang menurut peran pendamping sangat besar. Pendamping berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi secara intensif kepada kelompok dampingan yang kesiapannya

⁸ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lamopung, *Modul Tenaga Profesiaonal Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Inovasi Desa (PID)*, (Bandar lampung; 2018), h. 208

masih sangat rendah atau kelompok dampingan belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperjuangkan kepentingan secara mandiri.

2. Fungsi *selling* yaitu peran pendamping dimana kelompok damping belum memiliki kecakapan, namun memiliki kemauan kuat untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam kondisi demikian pendamping harus mampu memberikan gagasan, memberikan penjelasan dan dukungan terhadap antusias kelompok.
3. Fungsi *participating* yaitu fungsi yang di peran pendamping desa dalam kelompok dampingan dalam kondisi telah mampu memperjuangkan kepentingan atau menyelesaikan persoalan, namun kurang memiliki kemauan kuat untuk melakukannya. Kelompok demikian memerlukan dukungan untuk meningkatkan motivasi mereka dengan mengajak kelompok dampingan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini membantu meningkatkan hasrat kelompok untuk menjalankan kerjasama.
4. Fungsi *delegating* yaitu peran pendamping ketika kelompok telah memiliki kemampuan dan kemauan dalam memperjuangkan kepentingan pendamping, sehingga fungsi pendamping hanyalah sedikit dorongan dan memberikan mandat kepada kelompok untuk mengambil alih dan menjalankan tanggung jawab. pendamping desa pemberdaya sendiri dibentuk dengan tujuan yang sangat baik,

Dalam kajian *siyasah* sistem pemerintahan di atur dalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya,

undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁹

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹⁰ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.¹¹

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat.

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h.46-47

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.154

¹¹A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 47

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹²

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan diakhirat.¹³ Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".¹⁴

Berdasarkan teori *siasayah dusturiah* di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah membuat undang undang untuk melindungi hak-hak masarakat untuk memperoleh kedamain dunia dan akhirat. Namun dalam kenyataannya pendamping desa ini tidak berjalan sebagaimana peran dan fungsinya sesuai dengan undang-undnag yang telah di uraikan diatas , informasi yang penulis dapat dari beberapa kepala pekon yang ada di kecamatan cukuh balak pendamping desa datang kepekon hanya untuk menyusun laporan saja bahkan terkesan tidak berpengaruh baik ada ataupun tidak adanya pendamping.

¹²Muhammad Iqbal, *ibid*, h. 48

¹³Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*,h.11

¹⁴Abdul Qodir Djailani,*Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*,h.119

Sehubungan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut, maka saya tertarik untuk mengangkat suatu judul mengenai “Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” agar saya mengetahui apakah Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) tersebut sudah sesuai dengan pandangan *fiqih siyasah* atau tidak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya terhadap implementasi Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya terhadap implementasi Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, diharapkan menambah wawasan penulis tentang peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya.
2. Dari segi praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya peran dan fungsi pendamping desa yang telah diatur didalam Perundang-Undangan dan juga bagaimana pandangan Siyash mengenai peran dan fungsi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel atau satu demi satu secara sistematis fakta tentang peran dan fungsi Pendamping Desa Pemberdaya terhadap implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014.¹⁶

Selain dari itu skripsi ini juga bersifat analisis, artinya pengambilan

¹⁵Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h, 10

¹⁶*Ibid*, h, 23-24

kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variable untuk mengetahui selisihnya.¹⁷

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data dari jenis datanya masing-masing sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian yang ada di lapangan.¹⁸ Dalam hal ini data tersebut di peroleh dari pendamping desa pemberdaya, bapak camat Kecamatan Cukuh Balak dan seluruh kepala pekon yang ada di kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanngumus
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder umumnya berupa, bukti catatan, atau laporan historis.¹⁹ Adapun data yang penulis gunakan adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, buku-buku serta referensi lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda, atau yang dapat memperoleh atau memberika informasi (data) penelitian.²⁰ Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) kecamatan Cukuh Balak

¹⁷*Ibid*, h, 119

¹⁸Zeni Yuserli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h, 6

¹⁹*Ibid*, h, 7

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta Ilmu, 2002), h, 108

kabupaten Tanggamus provinsi Lampung, Pendamping Lokal Desa (PLD) kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus provinsi Lampung yang berjumlah empat (4) orang, Camat kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus provinsi Lampung, Tokoh agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, serta Kepala Pekon yang berjumlah 20 orang dari 20 pekon di kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.²¹ Jadi jumlah keseluruhan popuasi adalah 27 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.²² Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan rumus sampel yang dikemukakan oleh Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

²¹Profil Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

²²*Op.Cit*, h, 132

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

- a. Obsevasi, adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²³
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁴
- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁵

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data hasil observasi dan wawancara semua sudah terkumpul maka di lakukan pengolahan data dengan menggunakan :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustakan , studi lapangan dan dokumen di anggap sudah relevan dengan masalah, tidak lebih jelas, dan tanpsa kesalahan.
- b. Rekontruksi Data (*reconducting*) yaitu menyusun ulang data secarateratur, berurutan, logis sehingga mudah di fahami dan di interprestasikan.
- c. Sistematika Data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan nurutan masalah.

²³*Ibid*, h, 105

²⁴*Ibid*, h, 97

²⁵*Ibid*, h, 106

7. Analisis

Penulis akan menggunakan metode *Kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²⁶ dengan kata lain metode Kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁷ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.²⁸ Selain itu penulis menggunakan metode *Deduktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis juga menggunakan metode *Induktif*, yaitu menarik kesimpulan berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, lalu penulis melakukan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.²⁹

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h, 104

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004) h, 127

²⁸ Susiadi AS, *Op.Cit*, h, 106

²⁹ Zeni Yuserli, *Op.Cit*, h, 10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁰

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat beberapa pendapat. Pertama, sebagaimana dianut AL-Maqrizy menyatakan siyasah berasal dari bahasa mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah, pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur,

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2001, hlm.18.

memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³¹

Definisi lain *Al siyasah* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya".³²

Adapun menurut Terminologi Ulama, pengertian fiqh siyasah adalah sebagai berikut:³³

- a. Menurut Ahmad Fathi, *fiqh siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara (Ahmad Fathi Bahantsi dalam *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*).
- b. Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa *fiqh siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/ kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkan dan wahyu tidak membimbingnya.
- c. Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar *siyasah* berasal dari Muhammad

³¹ Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986), hal. 108.

³² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm28.

³³ *ibid*

saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.

- d. Menurut Abd Wahab al-Khallaf, Siyasah syar'iyyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. Maksud Abd Wahab tentang masalah umum negara antara lain adalah Pengaturan perundangan-undangan negara. Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan. Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan Urusan dalam dan luar negeri.
- e. Menurut Abd al-Rahman Taj; siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- f. Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna kontekstual ayat 58 dan 59 surat al-Nisa, tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam format siyasah syar'iyah. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Jika

meminjam istilah untuk negara kita adalah; Penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias politika) dan rakyat atau warga negara.

- g. Sesuai dengan pernyataan Ibn al-Qayim, siyasah syar'iyah harus bertumpu kepada pola syari'ah. Maksudnya adalah semua pengendalian dan pengarahan umat harus diarahkan kepada moral dan politis yang dapat mengantarkan manusia (sebagai warga negara) kedalam kehidupan yang adil, ramah, maslahah dan hikmah. Pola yang berlawanan dari keadilan menjadi dzalim, dari rahmat menjadi niqmat(kutukan), dari maslahat menjadi mafsadat dan dari hikmah menjadi sia-sia.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat

ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah* ‘amah yang tetap”.³⁴

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.³⁵ Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

³⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta : Matahari Masa, 1969, hlm.3

³⁵ Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, Kairo : Dar al-Ansr, 1977, hlm.5

- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁶

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyyah).

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Pulungan Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (tasriyyah) oleh lembaga legislative, peradilan (qadla'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan ('idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.³⁷

³⁶ J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Rajawali, 1994, hlm.28

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm13.

b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah*).

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Siyasah Dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Secara spesifik bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata. ³⁸

c. Politik Keuangan Dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*).

Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli mengatakan bahwa Siyasah Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Lain halnya dengan Pulungan (2002, hal:40) yang mengatak bahwa Siyasah

³⁸*Ibid*, hlm14.

Maliyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta Baitul Mal. Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa siyasah maliyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan kata lain siyasah maliyah membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁹

B. Siyasah Dusturiah

1. Pengertian Siyasah Dusturiah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁰

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh

³⁹ H. A. Djazuli, *Opcit*, hlm.31

⁴⁰ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hlm. 177

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok, *pertama*, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁴²

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

⁴¹ Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47

⁴² *Ibid.*, hlm. 48

- c. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.⁴³ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.⁴⁴
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).⁴⁵
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian

⁴³ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 157

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 155

⁴⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 49

yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.⁴⁶

- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.⁴⁷

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al- Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.⁴⁸ Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur.

Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang- undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.49

⁴⁷ Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan politik, PT Eresco, Bandung, 1971, hlm. 17-18

⁴⁸ Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah', Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 49

SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁴⁹ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁵⁰

3. Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 53

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 53-54

unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁵¹

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut ditegaskan oleh Aristoteles. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.⁵²

Secara *embrionik*, gagasan negara hukum yang telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicus*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dari konsep ini yang diidealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal

⁵¹Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta :Kencana,2005),h. 12

⁵²Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta : UII Press, 2005),

yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan kedalam bukunya *politica*.⁵³

Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaryang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul daripolis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam posisi itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁵⁴

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵⁵

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya

⁵³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h. 219.

⁵⁴Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987),h. 153.

⁵⁵Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),h. 166

memegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.⁵⁶

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

⁵⁶Rozikin Daman, *Op.Cit*, h. 166.

⁵⁷Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁵⁸

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwaker staat*.⁵⁹

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah negara hukum islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan *ijtihad* para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya peraturan-peraturan yang

⁵⁸TahirAzahary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1995),h. 20-21.

⁵⁹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PusatStudi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987),h. 152.

adasebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945.

Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara,⁶⁰ Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi Islam diantaranya :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 58, yang di terjemahkan sebagaai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁶¹

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat diarik dua garis hukum yaitu. Garis hukum pertama : manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan negara

⁶⁰Yusuf, Qardhawi, *Fiqih Negara* (Jakarta: Robbani Press,1997), h. 32.73

⁶¹ AL-quran dan terjemah an-Nisa: 58

perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan.⁶²

2. Prinsip penegakkan keadilan

Dalam surah an-Nisa/4:135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim kata keadilan

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁶³

Prinsip Islam dalam suatu negara mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transcendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam demokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan nya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.⁶⁴

3. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qurán surat Ali Imron : 159:

⁶².Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Op.Cit.*, h. 105.74

⁶³ AL-quran dan tarjemah an-Nisa: 135

⁶⁴*Ibid.*h. 117

Artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁶⁵

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu farum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.⁶⁶

4. Prinsip perdamaian

Al-Qur’an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 208 :

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu⁶⁷. ”

Dalam pandangan *siyasah dusturiah*, dalam perkembangannya hampir seluruh negara menerpahkan konsepsi negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law*.

⁶⁵ AL-quran dan tarjemah Ali Imron : 159

⁶⁶ *Ibid.* h. 111

⁶⁷ Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 208

Dalam konsepsi negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Semenetera konsepsi negara hukum *the rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Tradisi negara hukum *rechtstaat* dikenal dengan konsep *civil law system* sementara negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*. Secara teoritis perbedaan aliran kedua konsep negara hukum ini bisa dicermati dalam pandangannya mengenai arti hukum itu sendiri.

fiqh siyasah dusturiyah haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam Islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata *Al-Hukm*.

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijtihad para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai

pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya peraturan-peraturan yang ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945.

Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara, Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi. Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa konsep negara hukum dalam Islam atau yang disebut dengan nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mengacu pada hukum Islam dan memiliki prinsip-prinsip umum yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Indonesia merupakan negara sistem pemerintahanya menggunakan demokrasi. Akan tetapi, mayoritas penduduk indonesia merupakan umat Islam, dimana dalam setiap pembuatan peraturan harus diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunah. Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap manusia harus tunduk dan patuh kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat 59 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Mengenai Kata ulil amri sebagian ulama mempunyai beberapa pendapat:

Dalam Tafsir at-Tabari, sebuah kitab tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir at-Tabari dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli ta’wil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Berkata sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa ulil amri itu adalah *ahlul ilmi wal fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar.^{68 69}

Imam al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat “ulul amri” pada QS An-Nisa:59.

Pertama, ulil amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sady, dan

⁶⁸ Tafsir at-Tabari, juz 5, h. 147-149

Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sabab nuzul turunnya ayat ini. Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam *sariyah* (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah saw.). Sedangkan As-Sady berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam *sariyah*.

Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.⁷⁰

Ibn Katsir, setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna ulil amri, menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum ulil amri itu adalah umara dan ulama”⁷¹

Dari beberapa pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud ulil amri disini adalah pemimpin yang sah secara aturan dan perundang-undangan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Hukum patuh dan taat terhadap semua aturan yang ditetapkan adalah wajib. Patuh dan taat yang dimaksud disini adalah sebuah aturan itu wajib dan ditaati

⁷⁰ Tafsir al-Mawardi, jilid 1, h. 499-500

⁷¹ Tafsir al-Quran al-Azhim, juz 1, h. 518

oleh masyarakatnya jika aturan itu bisa dan mampu membawa kemaslahatan bagi orang yang menjalankannya

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.⁷²

Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq*' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁷³

Teungku dayah seorang ulama aceh berpendapat bahwa pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan Negara (integralistik). Ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala Negara yang diakui sebagai *ulil amri*, yaitu berasal dari kalangan ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apabila kepala Negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap bagian dari kewajiban agama. Padahal dalam Negara bangsa, seperti Indonesia, regulasi Negara diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai lembaga tinggi Negara, dan regulasi tersebut akan terus berlaku sampai aturan lain yang merubahnya. Pada

⁷² Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3.

⁷³ Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150

sisi lain, jabatan kepala Negara memiliki batas waktu. Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam mematuhi suatu suatu regulasi yang dihasilkan lembaga Negara, kalau harus melihat siapa kepala Negara ketika aturan dibuat. Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang dapat menjadi kepala Negara, bagaimana kalau tidak ditemukan ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun mengakomodir kepentingan beragama masyarakat?⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat mengetahui secara umum pemikiran teungku dayah salafi mengenai konsep *ulil amri*. Secara konseptual, mereka tidak memisahkan antara agama dengan Negara. Artinya, segala ketentuan yang dihasilkan Negara wajib diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama. Artinya semua aturan yang dihasilkan dalam sebuah kesepakatan sehingga menghasilkan sebuah undang-undang wajib ditaati oleh setiap warga negara. Aturan yang dimaksud disini adalah ketika dikaitkan dalam konteks Indonesia adalah setiap warga muslim harus taat kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu kaidah piqih mengenal istilah : *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

⁷⁴ Analiansyah, *Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukum (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, (Jurnal “Analisa” Volume 21 Nomor 02 Desember 2014) h. 268

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.⁷⁵

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i. Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemashlahatan bagi rakyatnya.

⁷⁵ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia, hal. 61-62

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Diantara contoh-contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat dari orang fasik sekalipun sholat berjamaah kita bersamanya sah, karena hal tersebut bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga kemashlahatan. Sedangkan membawa rakyat kepada hal-hal yang makruh itu tidak bersifat kemaslahatan. Padahal seorang pemimpin harus membawa atau memberikan kemashlahatan bagi rakyatnya. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam shalat bukanlah orang yang fasik.⁷⁶

C. Peran dan Fungsi Pendamping Desa menurut perundang-undangan

1. Pengertian Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia,

⁷⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm:144

yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan;
- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷⁷

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional⁷⁸ atau yang disebut dengan pendamping Desa.

Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa.

Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

⁷⁸ *ibid*

melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).⁷⁹ Artinya, apabila sudah habis masa kontraknya maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan selesai dan telah gugur kewajibannya untuk membantu Desa dampingannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dibuat dan disepakati.

2. Peran dan Fungsi Pendamping Desa

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa⁸⁰

fungsi pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

⁷⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

⁸⁰ Friedman, Marilym M. . *Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998), h. 286

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparat Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-

terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁸¹

3. Tujuan dibentuk pendamping desa

Tujuan dibentuknya pendamping desa ialah untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

⁸¹ *Ibid.*

Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 131. dijelaskan bahwa Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa melalui kewenangan masing-masing.⁸²

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kementerian Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kapasitas evektivitas dan akunta bilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan pertisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipasif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dengan di tetapkan undang undang-tentang desa, dan peraturan pelaksana undang-undang desa serta peraturan tentang Pendamping Desa Pemberdaya (PDP) diharapkan mampu menciptakan masarakat desa yang unggul dan mandiri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmiggrasi Republik Indonesianomor 3 tahun 2015 pasal 1 ayat 14 menjelaskan, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa dalam mewujudkan visi misi desa.

⁸²Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa*

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan yaitu :

1. Kedudukan dan Jenis Desa
2. Penataan Desa,
3. Kewenangan Desa,
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
5. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
6. Peraturan Desa,
7. Keuangan Desa dan Aset Desa ,
8. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
9. Badan Usaha Milik Desa,
10. Kerja Sama Desa,
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa
12. Lembaga Adat Desa, serta
13. Pembinaan dan Pengawasan.

Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Peraturan pemerintah republik indonesia no 43 tahun 2014 tentang tentang peraturan pelaksana undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan

secara jelas tentang tatacara pelaksana atau penerapan undang-undang no 6 tahun 2014 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 131 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ;

- 1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Menteri/pemimpin lembaga pemerintah nonkementrian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan setelah berkordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Singkat Kecamatan Cukuh Balak

Asal-usul penduduk kecamatan Cukuhbalak serta sejarah berdirinya kampung-kampung di wilayah kebandaran Lima Kecamatan Cukuhbalak adalah diawali oleh menyebarnya para bangsawan dari reruntuhan Kerajaan Besar “Skalabkhak” yang terletak di sekitar Liwa Lampung Utara, terkenal dengan sebutan “Tanohunggak”. Kerajaan Skalabkhak yang besar di Lampung di samping Kerajaan Talangbawang itu belum didapat data yang pasti kapan dan bagaimana lenyapnya. Diperkirakan adalah akibat perluasan Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang.

Bekas-bekas dan pengaruh kerajaan ini masih sangat berkesan di kalangan penduduk suku Lampung, karena kerajaan ini tidak lenyap begitu saja, melainkan berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berbentuk keratuan (kedatuan) sebagai sumber adat yang masih berlaku sampai sekarang di daerah Lampung. Keratuan-keratuan yang terkenal antara lain

- a. Keratuan Puncak, ibukotanya sekitar Sangukpatcak di lingkungan ibukota Skalabkhak.
- b. Keratuan Pugung, ibukotanya Pugung Mengandung Sukadana, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan sampai daerah-daerah sekitar Tanjungtua

- c. Keratuan Balau, ibukotanya terletak di Gunung Jualang di daerah Timur Kota Tanjungkarang.
- d. Keratuan Pemanggilan Keratuan ini ibukotanya di sekitar hilir kota Martapura (sekarang termasuk daerah/wilayah Propinsi Sumatera Selatan). Keturunannya tersebar di sekitar Sungai Komering (Sumatera Selatan), Krue, Liwa, dan sekitarnya (Lampung Barat), Teluk Semangka (Tenggamus), Telukbetung, Kalianda (Lampung Selatan).

Meskipun keturunannya tersebar dan terpencar-pencar namun mempunyai satu rumpun bahasa yaitu bahasa Lampung Pesisir. sebab itu, ada persamaan antara bahasa Komering dan bahasa Lampung Pesisir utara di Krue dan sekitarnya serta Lampung Pesisir selatan di wilayah Lampung Selatan dan sekitarnya.

Dilihat dari sejarahnya, Cukuhbalak termasuk Keratuan Pemanggilan karena terletak di daerah Teluk Semangka, begitu juga bahasanya memakai bahasa Lampung Pesisir (Lampung Pesesekh). Dalam Kecamatan Cukuhbalak terdapat lima Kebandaran terkenal dengan sebutan “Pesesekhlima” atau “Bandakhlima” karena kebandaran ini berjumlah Lima dan terletak di pesisir (di pantai lautan), yaitu:

- a. Makhga Pakhtiwi

Marga Pakhtiwi ini mempunyai 2 kebandakhan, yaitu:

- 1) Bandakhunggak

Bandakhunggak terdiri dari beberapa sabatin, yaitu: Sukakhaja, Kejadian

Lom, Kejadian Luah, Gedung, Sukadana, dan Banjakhnegekhi.

2) Bandakhdoh.

Bandakhdoh terdiri dari beberapa sabatin, yaitu: Tanjungjati, Tanjungkha, Sukapadang, dan Waykhilau. Kbandakhandoh belum diperoleh data tentang asal-usulnya. Sedangkan kbandakhanunggak berasal dari Tanohunggak Skalabkhak. Yang mula-mula datang ke Pakhtiwi tua-tua mereka ialah Das Dipati, Kabuai Sakha. Kini sudah 12 keturunan. Sedang yang memegang pemerintahan adat sekarang ini ialah Haji Ahmad Syaikh gelar Ratu Bakhlian keturunan yang kesebelas. Keturunan dari Bedas Dipati tersebut sebagai berikut:

- a) Bedas Dipati
- b) Kesayih
- c) Mas Chu
- d) Khadin Unang
- e) Kakhya Unang Negakha
- f) Minak Unang
- g) Khaja Pukhba
- h) Khaja Nitinegakha
- i) Batin Zakaria
- j) Kakhya Unang Negkhakha
- k) Ratu Bakhlian (H. Ahmad Syaikh)
- l) M. Maulana Muhammad Iqbal

b. Makhga Putih

Marga Putih, terdiri dua kebandaran yaitu: Kebandaran Putihdoh, dan Kebandaran Putihunggak. Putihdoh terdiri dari 7 sabatin (tiap-tiap sabatin mempunyai pemerintahan dan hak otonom untuk mengatur kepentingan lingkungan sendiri), yaitu: Sabatin Kedaloman (Bandakh), Pekontengah, Gedung, dan Mandawasa. Sedang Putihunggak terdiri dari Sabatin: Tanjungbetuah, Banjakhmanis, dan Bandakhunggak. Asal Marga Putihdoh ini ialah keturunan bangsawan Kabuai Mikhadatu, Skalabkhak. Yang mula-mula datang ke Putih ialah 5 saudara, yaitu:

- 1) Dalom Pamotokh Jagad menurunkan Pangeran Sultan Makhga selaku Kepala Adat Kemandakhan Putih.
- 2) Minak Sinahu menurunkan Panyimbang Suku (Luah Lawang).
- 3) Khaja Singganung menurunkan Raja Mangku Bandakh.
- 4) Tapak Gubang menurunkan Bintang Padoman
- 5) Tedung Pambosokh menurunkan Minak Bangsawan.

Ketika lima saudara ini tiba di Putih dan berdiam beberapa lamanya, seorang dari mereka ialah “Dalom Pamotokh Jagad” yang terkenal dengan panggilan Lanang Akuan meninggalkan Putih menuju Kalianda guna mencari tempat yang lebih baik. Konon Lanang Akuan ini mempunyai keberanian dan kesaktian yang melebihi saudara-saudaranya yang lain. Dapat diperkirakan kesaktian mereka itu menurut riwayat bahwa “Minak Sinahu” keturunan Luah Lawang dapat menyeberang ke Pulau Tabuan hanya dengan selembar kain putih separo diduduki

dan separo lagi sebagai layar dengan rasa yakin yang mendalam mengucap “Basmalah”.

Maka ketika kampung Putih yang masih sepi ini diserang oleh bajak-bajak laut (bajau), sehingga ada sebahagian penduduk menghindari bajau ini dengan berpindah ke pedalaman lebih jauh dari pantai, maka jadilah kampung-kampung Tanjungbetuah, Banjakhmanis, dan lain-lain. Berkali-berkali bajak laut itu menyerang dan merampas harta-harta penduduk di sepanjang pantai-pantai yang masih berpenduduk sepi itu.

Bajak-bajak itu diperkirakan bersamaan dengan datangnya Belanda ke Indonesia sekitar tahun 1682, karena pada waktu itu banyak perampok (perompak) sebagai bajak laut atau lanum yaitu anak buah Sultan Iskandar, tapi dihancurkan oleh Belanda Tahun 1704. Mungkin juga adalah suku Raas yakni pelaut-pelaut dari kepulauan Mentawai, atau suku Bugis dari Sulawesi.

Karena serangan-serangan bajak laut yang berkali-kali itu maka 4 saudara yang masih tinggal di Putih bersepakat untuk memanggil Dalom Pamotokh Jagat atau Lanang Akuan yang berada di Kalianda untuk kembali ke Putih guna mempertahankan serangan dari para bajau itu.

Mereka juga sepakat untuk mengangkat Dalom Pamotokh Jagat atau Lanang Akuan untuk menjadi pimpinan adat (Kepala Adat) di Kemandakhan Putih. Dia setelah dibujuk, datang ke Putih dengan membawa pedang terhunus sedang sarung pedang itu masih ditinggal di Kalianda. Hal ini konon, yang membuktikan adanya persamaan sejarah antara keturunan Pamotokh Jagat di Kalianda dan di Putih.

Kesepakatan 4 saudara Pamotokh Jagad beserta keputusan sidang makhga oleh beberapa sabatin di lingkungan Kemandakhan Putih untuk mengangkatnya sebagai kepala adat, setelah ia dapat mengalahkan bajau-bajau itu tidaklah disambutnya dengan serta merta, melainkan ia merasa keberatan. Alasannya bahwa dalam pemerintahan itu memerlukan beberapa persyaratan yang belum ia miliki, yaitu: rumah, harta, dan isteri. Keempat saudaranya itu menyanggupi untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka ia menetaplah di Putih sebagai Kepala Adat Kemandakhan Putih yang membawahi beberapa sabatin.

c. Makhga Badak

Asal mula keturunan Makhga Badak ini ialah Tanohunggak, Skalabkhak, dari Kabuai SINDI Krue Utara (Olokpandan).Tua-tua mereka mempunyai 2 saudara:

- 1) Yang tua Buai Bintang di Krue Lampung Utara.
- 2) Yang muda Buai Tengklek pergi ke daerah Teluk Semangka yaitu ada 3 saudara:
 - a) Khaja di Bandakh (Badak)
 - b) Batin Pankgikhan di Way Awi (Kecamatan Waylima Kedondong)
 - c) Panjukhit Agung di Tanjung Agung (Way Awi).

Karena para bangsawan ini sifatnya mencari tempat yang baik dan luas untuk masa depan anak keturunannya, maka kampung Badak yang dianggap kurang memenuhi syarat lagi sempit itu ditinggalkan oleh sebagian besar penududuknya. Perpindahan itu berjalan sejak satu sampai dua abad yang lalu. Di rentang masa selama itu menyebabkan anak keturunan yang berada di tempat

yang lebih maju seakan-akan tiada mengakui asal-muasal mereka dari Kemandakan Badak.

Faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan itu selain karena tanahnya sempit juga karena terjadi peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang menyebabkan terjadinya tsunami, air laut pasang naik ke darat. Beberapa tahun juga abu tebal masih menyelimuti tanah, yang akibatnya tidak bisa ditanami.

Perpindahan-perpindahan secara spontan juga masih terjadi, karena akibat sukarnya hubungan transportasi ke kota. Memang bertahun-tahun sebelum Orde Baru, belum ada akses jalan darat, yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Wilayah Makhga Badak yang berkembang menjadi beberapa Sabatin itu terletak di lain kecamatan di antaranya di Kecamatan Kedondong dan Waylima. Sudah berapa keturunan Makhga ini, belumlah dapat diketahui secara pasti, namun menurut catatan dalam permintaan tanah kepada Jonjom diperoleh secara beli adalah pada tahun: sapeku pak likokh (atau pada tahun 1024). Agaknya keterangan ini meragukan karena berdirinya pemerintahan Sultan Hasanuddin sekitar abad ke 16 (enam belas = 1527). Namun dari sudut arti Badak berarti tua (Balak) karena tanahnya tua. Pemerintahan Adat Makhga Badak menyebar ke pedalaman menjauhi pantai dan mendirikan pemerintahan adat sediri, di antaranya:

- 1) Batin Pangikhan di Pekondoh Wayawi
- 2) Batin Tanjungagung, Wayawi
- 3) Batin Paksi Wayawi

- 4) Batin Singa Makhga, Gedung Dalom Awayawi
- 5) Batin Panji Pekondoh, Wayawi
- 6) Batin Kemala Tanjungkha Wayawi

d. Makhga Limau

Asal Makhga Limau adalah Lamasa Kapampang, Skala bkhak. Perjalanan ke Limau melalui Krue, Waykanan, Waykhatai. Yang mula-mula datang ke Limau adalah Pangikhan Khaja Bungsu Sakti Dewa. Ia mempunyai 2 saudara, yaitu:

- 1) Pangikhan Kakhai Handak di Bengkulu (Propinsi Bengkulu)
- 2) Pangikhan Si Agul-Agul Pugungtampak (Krue Utara).

Keturunan Pangikhan Khaja Bungsu Sakti Dewa ini sampai sekarang sudah 12 generasi. Karena buku (catatan sejarahnya) terbakar dalam peristiwa kebakaran dua kali, maka yang sempat diingat hanya 7 keturunan, yaitu:

- 1) Pangikhan Khaja Bungsu Sakti Dewa
- 2) Lansak Batu.
- 3) Tambak Bata/Waykhatai
- 4) Dipati Anom
- 5) Khaja Paksi
- 6) Pangikhan Bandakhnegakha
- 7) Sultan Pangikhan Adat (Bunyana).

Kebandakhan ini terdiri dari 4 Panyimbang Batin, Kiri: Gununghaji, Tegineneng dan kanan Padangmanis, Sukanegekhi.

e. Makhga Kelumbayan

Makhga Kelumbayan terdiri dari beberapa sabatin antara lain: Negekhi Kelumbayan dan Panyandingan. Keturunan negekhi Kelumbayan belum diperoleh keterangan, sedang keturunan dari Sabatin Panyandingan ialah: Kabuai Gagili, Skalabkhak, termasuk Marga Balau. Mereka mulanya datang ke Padada (Umbulan Pagokh), kemudian ke Napal. Setelah itu ke Kelumbayan. Yang mula-mula datang ialah: Tuan Khaja Akuan dan Khadin Pamuka. Sampai sekarang sudah 8 generasi, yaitu:

- 1) Khaja Ngukhi Ali
- 2) Kakhya Raksa Jaya
- 3) Khaja Timur (Batin Pamuka)
- 4) M. Ali
- 5) Kakhya Laksamana
- 6) Batin Khaja Intan
- 7) Pangikhan Jaya Sampurna (H. Azhari)
- 8) Pangeran Pimpinan Makhga (Tamrin).

2. Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya Kecamatan Cukuh Balak sebagai organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepada masyarakat
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ekonomi di kecamatan
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistem administrasi kecamatan
- d. Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah kecamatan
- e. Meningkatkan propisionlitas aparatur dalam penyelenggaraan organisasi kecamatan
- f. Mendorong pran aktif masarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masarakat
- g. Menciptakan suasana aman, nyaman, damai dan indah di kecamtan cuku balak sebagai salah satu tujuan wisata
- h. Mendorong masarakat dan menghayati dan mengamalkan syariat agama dan pancasila dalam kehidupan sehari hari.

3. Letak geografis Kecamatan Cukuh Balak

Kecamatan Cukuh Balak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Batubalai/ wilayah Kecamatan Kota Agung.
- b. Sebelah timur dengan Lengkuai / wilayah Kecamatan Padangcermin
- c. Sebelah selatan dengan lautan Indonesia dan sebuah pulau, Pulau Tabuan yang masih termasuk wilayah Kecamatan Cukuhbalak.
- d. Sebelah utara dengan Tanjungsiom batas Kecamatan Pardasuka.

4. Wilayah Administratif Kecamatan Cukuh Balak

Kecamatan Cukuh Balak memiliki luas wilayah sekitar 30,5 Km², dengan 20 Pekon yang masing-masing luas dan jarak tempuh Desa ke Ibukota Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.Luas Wilayah Menurut Desa/Pekon dalam Kecamatan Cukuh Balak

No	Desa/Pekon	Luas (ha)
1.	Putihdoh	3.427
2.	Pekondoh	2.500
3.	Tanjung Batuah	2.000
4.	Banjar Manis	1.500
5.	Pampangan	1.330
6.	Kaca Marga	1.310
7.	Tengor	825
8.	Wayrilau	1.000
9.	Tanjung Raja	800
10.	Tanjung Jati	960
11.	Kejadianlom	1.552
12.	Suka Padang	2.350
13.	Gedung	1.200
14.	Banjar Negeri	2.500
15.	Suka Raja	1.710
16.	Kubulangka	1400
17.	Sawang Balak	1.350
18.	Karangbuah	960
19.	Suka Banjar	995
20.	Kuta Kakhang	830
	Jumlah	30.499

Tabel 2. Jarak Desa/Pekon Ke Ibukota Kacamatan

No	Desa/Pekon	Jarak (Km)
1.	Putihdoh	0,5
2.	Pekondoh	1
3.	Tanjung Batuah	1,5
4.	Banjar Manis	3
5.	Pampangan	5m
6.	Kaca Marga	5,5
7.	Tengor	5 m
8.	Wayrilau	6
9.	Tanjung Raja	10
10.	Tanjung Jati	10,5
11.	Kejadianlom	11
12.	Suka Padang	12
13.	Gedung	15
14.	Banjar Negeri	16
15.	Suka Raja	16
16.	Kubulangka	20
17.	Sawang Balak	25
18.	Karangbuah	30
19.	Suka Banjar	25
20.	Kuta Kakhang	30

5. Data Monografi Kecamatan Cukuh Balak

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Cukuh Balak sebanyak 6.822 Kepala Keluarga, terdiri dari 21.369 jiwa, dengan 10.635 Laki-laki dan 10.734 perempuan.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.Jumlah Penduduk Perjanuari 2016- 2017

NO	PEKON/KEL	Jumlah Kk	Jumlah PDD	PDD Perempuan	PDD Laki-Laki	PDD Miskin
1	Putihdoh	963	2727	1327	1400	215
2	Pekondoh	602	1880	942	938	195
3	Tanjung Batuah	370	1087	541	546	139
4	Banjar Manis	342	1280	643	637	155
5	Pampangan	262	863	444	419	108
6	Kaca Marga	759	2242	1151	1091	208
7	Tengor	259	670	327	343	65
8	Wayrilau	329	1270	619	651	117
9	Tanjung Raja	235	724	367	357	64
10	Tanjung Jati	95	258	124	134	34
11	Kejadianlom	345	886	448	438	53
12	Suka Padang	267	749	383	366	83
13	Gedung	177	631	307	324	57
14	Banjar Negeri	468	1432	720	712	144
15	Suka Raja	185	592	294	298	45
16	Kubulangka	472	1154	571	583	89
17	Sawang Balak	268	1048	556	492	66
18	Karangbuah	174	795	416	379	73
19	Suka Banjar	168	600	315	285	40
20	Kuta Kakhang	142	481	239	242	47
	Jumlah	6882	21369	10734	10635	1995

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu peningkatan sumber daya manusia dan untuk mempersiapkan generasi penerus yang handal berdaya guna dan bermartabat serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Berikut data lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Cukuh Balak.

Tabel 4. Sekolah Umum dalam Desa/Pekon Kecamatan Cukuh Balak

NO	KEL/PEKON	JENIS SEKOLAH					
		TK/PAUD	SD	SLTP	SMA	SMK	UNIV
1	Putihdoh	2	2				
2	Pekondoh	2	2	1			
3	Tanjung Batuah	1	2		1		
4	Banjar Manis	1	1				
5	Pampangan	1	1				
6	Kaca Marga	1	3	1			
7	Tengor	1	1	1			
8	Wayrilau	1	1				
9	Tanjung Raja	1	1				
10	Tanjung Jati	1	0				
11	Kejadianlom	1	2				
12	Suka Padang	1	1				
13	Gedung	1	1				
14	Banjar Negeri	2	2				
15	Suka Raja	1	1				
16	Kubulangka	1	1				
17	Sawang Balak	1	1	1			
18	Karang buah	1	2				
19	Suka Banjar	1					
20	Kuta Kakhang	1					
	Jumlah	23	25	4	1	0	0

Tabel 5. Data sarana PAUD/ TK

NO.	Nama PAUD/TK	Alamat	Desa
1	TK Al- Azhar	Dsn.suka maju	Putihdoh
2	Mutiara Putih	Dsn.suka jaya	Putihdoh
3		Waybangik	Pekondoh
4	Kasih Bunda	Pekondoh	Pekondoh
5		Tanjung betuah	Tanjung betuah
6		Banjar manis	Banjar manis
7		Pampangan	Pampangan
8	As – Salam	Kaca marga	Kacamarga
9	Pertiwi	Wayrilau	Way rilau
10	Al- Falah	Tengor	Tengor
11	Al- Ikhlas	Banjarnegeri	Banjar negeri
12		Banjar negeri	Banjar negeri
13	Saihati	Tanjung raja	Tanjung raja
14		Kejadianlom	Kejadianlom
15		Gedung	Gedung
16		Suka Raja	Suka Raja
17	Pusikam	Suka padang	Suka padang
18	Miftahul Huda	Kubu langka	Kubulangka
19	Tanjung Jati	Tanjung jati	Tanjung jati
20		Sawang Balak	Sawang Balak
21		Suka Banjar	Suka Banjar
22		Karang Buah	Karang Buah
23		Kuta Kakhang	Kuta Kakhang

Tabel 6.Data Sarana Sekolah Dasar

No	Nama Sekolah	Alamat	Desa
1	SDN 1 Putihdoh	Dusun Sabah Bawah	Putihdoh
2	SDN 2 Putihdoh	Dusun Suka Maju	Putihdoh
3	SDN 1 Pekondoh	Dusun Tanjung Makmur	Pekondoh
4	SDN 2 Pekondoh	Dusun Waybangik	Pekondoh
5	SDN 1 Tanjung Betuah	Dusun Tanjung Betuah	Tanjung Betuah
6	SDN 2	Dusun	Tanjung Betuah
7	SDN	Dusun	Banjar Manis
8	SDN 1 Pampangan	Dusun Suka Pura	Pampangan
9	SDN 1 Kaca Marga	Dusun Kaca Marga	Kaca Marga
10	SDN 2 Kaca Marga	Dusun Kaca Marga	Kaca Marga
11	SDN 3 Kaca Marga	Dusun Gunung Rejo	Kaca Marga
12	SDN 1	Dusun Pelandian	Tengor

13	SDN 1	Dusun Pahmungan	Wayrilau
14	SDN 1 Tj.Raja	Dusun Tanjung Raja	Tanjung Raja
15	SDN 1	Dusun Kejadianlom	Kejadianlom
16	SDN 2	Dusun Mastambong	Kejadianlom
17	SDN	Dusun Suka Padang	Suka Padang
18	SDN	Dusun Gedung	Gedung
19	SDN 1	Dusun Banjar Negeri	Banjar Negeri
20	SDN 2	Dusun Kedamayan	Banjar Negeri
21	SDN 1	Dusun Tanjung Senang	Suka Raja
22	SDN	Dusun Kubu Langka	Kubu langka
23	SDN 1	Dusun Karang Buah	Karang Buah
24	SDN 2	Dusun Waylebung	Karang Buah
25	SDN 1	Dusun Sawang Balak	Sawang Balak

Tabel 7. Data Sarana SMP

No.	Nama Sekolah	Alamat	Desa
1	SMPN.1 Cukuh Balak	Dusun Tanjung Agung	Pekondoh
2	SMPN.2 Cukuh Balak	Dusun Tanjung Raja	Tanjung Raja
3	SMPN.3 Cukuh Balak	Dusun Kaca Marga	Kaca Marga
4	SMP.S AL-ISLAM	Dusun Alang-Alang	Tengor

Tabel 8.Data Sarana SMA

No.	Nama Sekolah	Alamat	Desa
1.	SMAN.Cukuh Balak	Dusun Tanjung Betuah	Tanjung Betuah

Tabel 9.Data Sekolah Islam dalam Desa/Pekon Kecamatan Cukuh Balak

NO.	KEL/PEKON	JENIS SEKOLAH		
		MI	MTS	MA
1	Putihdoh	1		
2	Pekondoh		1	1
3	Tanjung Batuah			
4	Banjar Manis			
5	Pampangan			
6	Kaca Marga			
7	Tengor			
8	Wayrilau			

9	Tanjung Raja			
10	Tanjung Jati			
11	Kejadianlom			
12	Suka Padang		1	1
13	Gedung			
14	Banjar Negeri			
15	Suka Raja			
16	Kubulangka			
17	Sawang Balak		1	1
18	Karangbuah			
19	Suka Banjar			
20	Kuta Kakhang			
	Jumlah	1	3	3

c. Agama

Penduduk Kecamatan Cukuh Balak yang beragama Islam mencapai 99,9 % sedangkan 0,1 % memeluk agama Kristen. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Cukuh Balak adalah sebanyak 14 tempat ibadah yang terdiri dari 12 masjid dan 2 langgar atau surau yang tersebar di masing-masing desa.

Tabel 10. Data Masjid dan Musolla dalam Kecamatan Cukuh Balak

No	Desa/Pekon	Jumlah Musholla	Jumlah Mesjd
1	2	3	4
1	Putihdoh	2	2
2	Pekondoh	2	2
3	Tanjung Batuah	2	1
4	Banjar Manis	2	2
5	Pampangan	2	3
6	Kaca Marga	2	3
7	Tengor	2	2
8	Wayrilau	2	1
9	Tanjung Raja	0	1
10	Tanjung Jati	0	1
11	Kejadianlom	0	1
12	Suka Padang	0	2
13	Gedung	0	2

14	Banjar Negeri	0	7
15	Suka Raja	0	1
16	Kubulangka	2	2
17	Sawang Balak	0	1
18	Karangbuah	2	2
19	Suka Banjar	0	1
20	Kuta Kakhang	0	1
	Jumlah	20	38

d. Adat Istiadat

Penduduk Kecamatan Cukuh Balak sebagian besar merupakan penduduk suku Lampung, dimana bahasa sehari-hari yang digunakan umumnya bahasa Lampung serta adat dalam pernikahan merupakan adat asli daerah Kecamatan Cukuh Balak.

e. Pekerjaan

Kecamatan Cukuh Balak terdiri dari daerah Pegunungan dan lahan yang mencapai 70%, perkebunan, masyarakat Kecamatan Cukuh Balak menggantungkan hidupnya dengan bertani, antara lain persawahan. Selain bertani masyarakat Cukuh Balak memanfaatkan lahannya di sektor perkebunan, antara lain cengkeh kopi dan kakau dan sebagian masyarakat bermata pencaharian dengan berdagang, disamping itu pula banyak masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan (nelayan), yaitu desa yang berada di daerah pantai.

1) Pertanian

Sawah adalah salah satu contoh pertanian yang ada dikecamatan Cukuh Balak, petani di wilayah ini memulai Penggarapan dan penyemaian benih pada Akhir musim kemarau selanjutnya penanaman pada musim penghujan datang, Lahan

yang digunakan oleh petani adalah daerah yang dialiri sungai atau Anak Sungai karena lahan ini sangat cocok digunakan untuk menanam tumbuhan yang sangat memerlukan air dan kelembaban udara ini atau sama halnya dengan petani padi lain yang ada di Indonesia. Biasanya rata-rata petani panen pada bulan Juni jika keadaan musim normal, dan biasanya petani mengolah hasil panennya sendiri dikarenakan petani ini perorangan bukan kelompok (kelompok tani). Disamping itu petani dikecamatan Cukuh Balak juga mempunyai kendala yang sangat perlu perhatian oleh Pemerintah atau Investor, karena masih banyak lahan tidur yang masih belum dimanfaatkan oleh petani disebabkan kurangnya modal dalam mengelola lahan yang ada, lahan yang subur ini sangat besar dampaknya bila dikelola dengan baik dikarenakan dapat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat khususnya para petani sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah baik itu dalam bentuk dana maupun pengetahuan dalam hal ini wawasan dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mencapai hasil yang lebih baik.

2) Perkebunan

Perkebunan yang ada di Kecamatan Cukuh Balak seperti , karet, jagung, coklat, kopi dan cengkeh tetapi mayoritas masyarakat banyak memanfaatkan lahan mereka dengan menanam karet. Karet adalah salah satu tanaman yang sangat digandrungi oleh petani karena hasil yang sangat menguntungkan disamping itu pula usia tanaman ini mencapai 7 tahun dalam hasil panen sedangkan panen dilakukan setiap hari.

Sama dengan pertanian, perkebunan juga memiliki kendala dari segi pemahaman berkebun dalam hal ini petani sangat mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat menambah wawasan mereka serta bantuan untuk mengelolah lahan-lahan yang masih kosong dan belum dimanfaatkan oleh petani. Petani juga tak hanya mengaharapkan bantuan dari pemerintah setempat namun mereka juga mengharapkan adanya Investor yang dapat bekerja sama dalam hal ini perkebunan karet yang baru diminati oleh masyarakat di Kecamatan Cukuh Balak.

Table 11. Data hasil perkebunan Kecamatan Cukuh Balak

No	Kel/Pekon	Tanaman Buah (Ha)					
		Kopi	Lada	Kelapa	Cengkeh	Kakao	Pala
1	Putihdoh	11	8	10	20	25	5
2	Pekondoh	20	10	6	21	40	9
3	Tanjung Batuah	22	15	3	18	30	2
4	Banjar Manis	30	15	5	20	50	0
5	Pampangan	30	20	6	11	40	1
6	Kaca Marga	60	9	5	7	70	4
7	Tengor	35	7	20	15	17	6
8	Wayrilau	15	11	40	20	20	2
9	Tanjung Raja	21	15	4	22	40	9
10	Tanjung Jati	10	6	2	11	20	1
11	Kejadianlom	20	19	3	30	40	4
12	Suka Padang	30	9	7	25	40	2
13	Gedung	40	7	3	10	20	0
14	Banjar Negeri	50	10	10	30	60	4
15	Suka Raja	20	7	2	20	40	3
16	Kubulangka	60	15	9	11	70	4
17	Sawang Balak	7	9	30	30	20	2
18	Karangbuah	15	10	20	25	30	3
19	Suka Banjar	10	11	15	40	30	2
20	Kuta Kakhang	10	5	20	30	17	2

3) Peternakan dan Perikanan

Peternakan memang banyak dalam setiap daerah begitu juga peternakan yang ada dikecamatan Cukuh Balak , salah satu contoh adalah Pekon Putihdoh yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai peternak baik itu Kambing, Sapi ataupun Kerbau. Selain Ternak ,dipekon Putihdoh juga termasuk daerah perikanan, perikanan yang di dapat Oleh Petani Nelayan .

4) Pertambangan

Kecamatan Cukuh Balak dialiri sungai Besar dan di Apit oleh Pegunungan yang membatasi dan membelah antara desa dan desa lain yang ada dikecamatan ini, otomatis dari segi pemafaatan sangat banyak dalam hal ini pertambangan Emas dan Ziolit adalah salah satu Potensi Peningkatan usaha warga setempat, dengan demikian pekerjaan ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat membantu roda perekonomian masyarakat.

5) Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Rumah Tangga yang terdapat dikecamatan Cukuh Balak diantaranya pembuatan Tempe di Pekon Kaca marga ,Pekon Putihdoh s, Penjahit pakaian atau tekstil yg terdapat di Pekon Kaca Marga, Putihdoh dan Kejadianlom.Usaha ini sangat mendukung perkonomian masyarakat karena dapat menyerap tenaga kerja yang relative banyak sehingga bisa membantu jalannya aktivitas perekonomian yang mandiri.Kualitas usaha tersebut cukup meyakinkan karena sudah banyak pendatang dari luar daerah yang membeli hasil kerajinan maupun usaha lainnya. Disamping itu usaha rumah tangga ini juga mempunyai kendala dari segi permodalan untuk itu pengrajin maupun

pengusaha kecil ini mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk dapat memberikan bantuan dana serta pemasaran hasil usaha sehingga tercapainya masyarakat yang makmur.

6) Perdagangan

Perdagangan atau juga sering disebut jual beli adalah suatu proses transaksi yang telah disetujui oleh semua pihak dengan suatu ketentuan. Perdagangan dikecamatan Cukuh Balak berkembang cukup pesat dimana terdapat pasar yang berada di pusat kota Kecamatan, dengan ini pusat transaksi terjadi dengan seketika dipasar tersebut. Pasar Kecamatan Cukuh Balak telah berdiri Beberapa Pasar di kecamatan Cukuh Balak diantaranya ialah Pasar Senen di Pekon Putihdoh, Pasar selasa di Pekon Kacamarga dan Pasar Rabu di Pekon Tajung Raja, pasar ini sudah berkembang dengan seiringnya perubahan dan Perkembangan Kecamatan Cukuh Balak. Terlihat jelas di pasar ini adanya proses jual beli yang dilakukan setiap hari.

Pasar Kecamatan Cukuh Balak sangat bermanfaat diantaranya mekarnya suatu daerah dengan adanya suatu aktivitas perekonomian, mekarnya daerah tersebut dapat dilihat dengan banyaknya Warung , kios-kios, rumah makan. Dengan didukung tempat yang sangat strategis yang sangat menunjang kemajuan pasar.

Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus provinsi lampung dengan memiliki 20 pekon yaitu :

- 1) Putihdoh
- 2) Pekondoh

- 3) Tanjung Batuah
- 4) Banjar Manis
- 5) Pampangan
- 6) Kaca Marga
- 7) Tengor
- 8) Wayrilau
- 9) Tanjung Raja
- 10) Tanjung Jati
- 11) Kejadianlom
- 12) Suka Padang
- 13) Gedung
- 14) Banjar Negeri
- 15) Suka Raja
- 16) Kubulangka
- 17) Sawang Balak
- 18) Karang buah
- 19) Suka Banjar
- 20) Kuta Kakhang

B. Peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya di kecamatan cukuh balak

Kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan

fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumberdaya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang di alami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Kecamatan Cukuh Balak merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan menaungi 20 desa/pekon, kondisi sosial masarakat cukuh balak rata-rata bekerja sebagai petani, nelayan dan wirausaha, dalam menunjang kemajuan daerah dalam hal pemberdayaan kecamatan cukuh balak mempunyai satu pendamping desa pemberdaya yang berkedudukan di kecamatan, dan dibantu oleh pendamping lokal desa dengan jumlah 4 orang, satu pendamping lokal desaa menaungi 4 desa atau pekon, dalam membantu memajukan suatu daerah pendamping desa mempunyai fungsi yang di atur dalam permendes no 3 tahun 2015.

Adapun pekon-pekon dampingan yang di dampingi oleh pendamping desa di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggmus dapat di lihat dalam tabel berikut :

No	Nama pekon-pekon dampingan	Nama pendamping lokal desa (berkedudukan di pekon)	Nama pendamping desa pemberdaya (berkedudukan di kecamatan)
1	Pekon Tengor	Thorik iqbal	
2	Pekon Way Rilau		
3	Pekon Tanjung Raja		
4	Pekon Tanjung Jati		
5	Pekon Pampangan		
6	Pekon Kacamarga		

7	Pekon Sukapadang	Afriantoni	Fernando Huda Utama
8	Pekon Kejadianlom		
9	Pekon Doh	Liskhori	
10	Pekon Putih Doh		
11	Pekon Banjakh Manis		
12	Pekon Tanjung Betuah		
13	Pekon Sawang Balak	hendriansyah	
14	Pekon Suka Banjakh		
15	Pekon Kuta Kakhang		
16	Pekon Kakhang Buah		
17	Pekon Gedung		
18	Pekon Banjar Negeri		
19	Pekon Sukaraja		
20	Pekon Kubulangka		

Menurut Fernando Huda Utama selaku pendamping desa kecamatan cuku balak “pendamping desa mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan peningkatan kfasitas sebagai kader pemberdayan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pemberdaya, namun dilapangan seorang pendamping desa harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi sosial yang ada di masyarakat”.⁸³

Dalam melakukan fungsi pendampingan desa, seorang pendamping desa bersama sama terlebih dahulu menyatukan pemikiran guna untuk mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman di tengah masarakat, hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh, bapak Rusdi S.E “adanya pendamping desa ini kan tujuannya

⁸³.Bapak Fernando Huda, Pendamping Desa Pemberdaya Wawancara Dengan Penulis 12, Juni 2019, Pukul 13.00.

untuk membantu dalam memajukan masarakat, jadi sebelum terjun ke lapangan ia harus menyamakan pemikiran dulu dengan masarakat”⁸⁴

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Tobi’ selaku salah satu tokoh agama yang ada di kecamatan Cukuh Balak . “tugas pokok pendamping desa adalah mendampingi desa dalam berbagai macam kegiatan, itulah yang harus dijelaskan kembali kepada masarkat, karna apa ? ya namanya disini rata-rata masyarkat kecil mas kalau gak kita kasih pemahaman takutnya salah paham”⁸⁵

Pelaksanakan tugas pendamping desa pemberdaya di bantu oleh pendamping lokal desa agar proses pelaksanaan tugas dapat maksimal hal ini di sampaikan oleh Hendriansyah selaku salah satu pendamping lokal desa “ya kami dalam proses pelaksanaan tugas membantu pendamping desa pemberdaya yang berkedudukan di kecamatan karna sudah tidak mungkin dong mau dia smua yang ngurus 20 desa yang ada di kecamatan ini”⁸⁶

Peran dan fungsi pendamping desa pemberdaya dan pendamping lokal desa tidak jauh berbeda sama-sama mendampingi desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masarakat desa, hal ini di sampaikan oleh bapak aprianтони selaku salah satu pendamping lokal desa “ya kalo bicara peran sih sama saja pendamping desa pemberdaya dan pendamping lokal desa sama-sama membantu desa memberdayakan masarakat bahkan seharusnya pendamping desa pemberdayaa

⁸⁴. Bapak Rusdi, S.E, Camat Kecamtan Cukuh Balak Wawancara Dengan Penulis, 12 Juni 2019, Pukul 13.00

⁸⁵.Bapak Tobi’, Tokoh Agama Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 2019, Pukul 10.30

⁸⁶.Bapak Hendriansyah, Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 13.30

pun harus turun langsung ke masarkat agar supaya kita mengetahui kendala yang ada di masarakat.⁸⁷

Untuk melakukan pemberataan pendampingan pendamping lokal desa di bagi menjadi 5 bagian satu pendamping lokal desa membawahi 4 desa akan tetapi di kecamatan cukuh balak ada 4 desa yang pendamping desanya mengundurkan diri yang kemudia menjadi tugas tambahan untuk pendamping lokal desa yang lain sehingga menyebabkan kurang maksimalnya peroses pendampingan hal ini di sampakan oleh bapak liskhori “ dulu kami pendamping ini ada 5 jadi satu pendamping membawahi 4 pekon tapi sekarng satu pendamping mengundurkan diri jadi kami tinggal berempat saja, jadi kadang kami kerepotan juga apalggi kadang kadang desa ini melakukan kegiatan inikan secara bersama-sama jadi kami juga kadang bingung mensiasatiny heheheh begitu kira kira mas”⁸⁸

Pemberdayaan di lakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masarkat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, metode ini juga di lakukan oleh salah satu pendamping lokal desa dalam intraksi nya dengan desa binaanya terlebih dahulu dia dekat dengan seluruh aparat desa, mereka harus di beri pemahaman bahwa pendamping desa merupakan teman kerja dalam hal pemberdayaan dengan tujuan sluruh aparat mau memberikan informasi kepada pendamping desa hal ini di sampaikan oleh Thorik Ikbal selaku pendamping lokal desa “kalo pola yang sering saya pakai untuk memudahkan rencana berjalan sesuai rencana tentu saya harus bisa berbaur dengan desa binaan saya supaya

⁸⁷ .Bapak Apriantoni, Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 15.30

⁸⁸ . Bapak Liskhori, Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, 14 Juni 2019, Pukul 09.30.

mereka mau terbuka dan memberikian informasi kedapa terkait pemberdayaan intinya saling mengisi dan memberi solusi lah pak”.⁸⁹

Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masarakat dapat di artikan sebagai suatu proses yang di lakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan di pekon, untuk melaksanakan fungsi pendampingan pendamping lokal desa sering kali hadir dalam kegiatan musawarah desa hal ini di sampaikan oleh kepala pekon tanjung raja yaitu, bapak Karnilas Parontaka “pendamping lokal desa biasanya hadirnya pada saat desa melakukan musawarah desa yang membahas berkenaan dengan pemberdayaan dan yang lain lain, selain dari situ pendamping datang ketika kita panggil untuk membantu kami jika kami sedang kesulitan”⁹⁰

Pekon kubu langka yang merupakan salah satu pekon yang ada di kecamatan cukuh balak, telah berdiri BUMDES atau badan usaha milik desa berupa air bersih yang juga merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan desa yang di atur dalam undang-undang No 6 tahun 2014, dalam proses pembuatan dari nol sampai jadi badan usaha milim desa, terlebih dahulu desa melakukan konsultasi dengan pendamping karna BUMDES juga merupakan kegiatan pemberdayaan, hal ini di sampakikam oleh kepala pekon kubu langka bapak sobirin “ya kalo bicara pemberdayaan pekon kubu langka juga sudah mempunya upaya yaitu pembentukan BUMDES, pemebntukan ini gak gampang lo mas ini perlu perjuang

⁸⁹ . Bapak Thorik Ikbal, Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, 14 Juni 2019, Pukul 13.30.

⁹⁰ .Bapak Karnilas Parontaka Kepala Pekon Tanjung Raja Wawancara Dengan Penulis, 14 Juni 2019, Pukul 15.30.

panjang heheh, dalam pembentukan bumdes ini kami dengan pendamping lokal desa bersama-sama saling bertukar pikiran kok supaya berjalan lancar”⁹¹

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh kepala pekon banjar negeri yaitu bapak Abdul Rohman “kalo disini pendamping desa berbicara peran sudah berjalan akan tetapi gak lama mengundurkan diri jadi kadang kami bingung mau bertanya tentang hal yang kami belum mengerti bertnya dengan siapa, harapannya segera dibentuk kembali pendampingan desa ini pak supoaya smua bisa berjalan lancar”⁹²

Dalam upaya melakukan pendampingan pendamping desa mendapatkan repon positif dari pekon sukaraja hal ini di sampaikan oleh bapak Mat Rais “kami masarakt sukaraja sangat bangga dan sangat merasa terbantu dengan ada pendampingan ini jadi jika ada persoalan yang kami tidak faham kami bisa berkonsultasi dengan pendamping, apalagi kita sebagai kepala pekon ini sejak ada undang-undang tentang desa ini sistem penerapannya agak rumit dari sebelum-sebelumnya”⁹³

Peranan pendamping desa dalam membantu memajukan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai peranan yang sangat signifikan. Dalam hal pembangunan, yang didalamnya melibatkan antara relasi masyarakat maka pendamping desa harus mampu membentuk sejenis pengorganisasian masyarakat.

⁹¹ . Bapak Sobirin Kepala Pekon Kubulangka, Wawancara Dengan Penulis, 15 Juni 2019 Pukul 10.00.

⁹² . Bapak Abdurrohman Kepala Pekon Banjar Negeri, Wawancara Dengan Penulis, 15 Juni 2019 pukul 12.30.

⁹³ ,Bapak Mat Rais Kepala Pekon Suka Raja, Wawancara dengan Penulis, 15 Juni 2019 Pukul 15.30.

Pengorganisasian yang dimaksud disini ialah untuk membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut kepala pekon gedung bapak baynuri “ dalam menjalankan tugasnya pendamping lokal desa melakukan pengorganisasian masyarakat dengan cara bergabung kepada ibu-ibu PKK setempat. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali PKK kegiatan-kegiatannya. Sehingga nantinya mampu menciptakan SDM yang lebih baik.⁹⁴

Dalam hal melakukan pemberdayaan, pendamping desa tidak hanya melakukan pendampingan saja, tetapi melakukan pengawasan secara intens kepada masyarakat, hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Hayuza kepala pekon tanjung betuah “ disini pendamping desa tidak Cuma mendampingi mas, tapi juga mengawasi, karna kalo gak diawasi biasanya cepet berhenti kegiatan itu. Hehe”.⁹⁵

Dipekon putih doh pendamping desa turut serta dalam melakukan perancangan-perancangan kegiatan bersama aparatur pekon, ikut memberikan ide serta gagasan terutama dalam hal pemberdayaan. Hal ini di sampaikan oleh kepala pekon bapak Muzallip, “ya sering ikut musawarah kalo pendamping di putih doh ini karna memang sering kita undang juga dalam muasawarah besar pekon untuk membantu aparat merumuskan kegiatan kedepan pak”⁹⁶

⁹⁴ .Bapak Baynuri Kepala Pekon Gedung, Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2019, Pukul 11.00

⁹⁵ Bapak Hayuza Kepala Pekon Tanjung Betua Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2019, Pukul 15.00

⁹⁶ .Bapak Muzallip Kepala Pekon Putih Doh Wawancara Dengan Penulis, 17 Juni 2019, Pukul 12.00

Di pekon karang buah, pekon sawang balak, pekon suka banjkh dan pekon kuta kakhng 4 pekon ini merupakan pekon yang berada di pulau tabuan yang masih masuk dalam wilayah kecamatan cukuh balak, dalam persoalan pemberdayaan 4 pekon tersebut di dampingngi pendamping lokal desa yang bernama Hendriansayah, dalam melaksanakan tugas hendri menepuh jarak hingga 1 jam setengah perjalanan melalui jalur laut.

Untuk melakukan pendampingan 4 pekon tersebut musawarah bersama dengan pendamping untuk membuat terobosan baru, hal ini di sampaikan oleh bapak salman kepala pekon suka banjkh “kita sering kumpul bersama pendamping membahas terkait pemberdaan mulai dari ibuk-ibuk pkk sampai dengan BUMDES ya semoga saja lancar”.⁹⁷ untuk jadwal kumpul bersama mereka menyesuaikan waktu pendamping seperti yang disampaikan oleh bapak alek selaku kepala pekon karang buah “kalo waktu kumpul sih kami ikut jadwal pendamping karna kami maklum akses untuk menuju kesinikan agak sulit jadi kami tidak memaksa pendamping harus hadir kadang kami ketemuannya di kecamatan kdang juga dia kesini”.⁹⁸

Selain jarak yang jauh di daerah itu juga susah sinyal sehingga menyebabkan susah nya berbagi informasi, disampaikan oleh kepala pekon sawang balak bapak marbawi “ disini kan pulau pak kalo kendala selain jauh kita ini susah sinyal jadi kadang kadang pekon kita ketinggalan info terus heheh maklum pak kita ini orang

⁹⁷ . Bapak Salman Kepala Pekon Suka Banjkh Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2019 Pukul, 09.00

⁹⁸ . Bapak Alek Kepala Pekon Karang Buah Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2019 Pukul, 11.00

ujung pulau”.⁹⁹ dipekon kuta kakhang pemberdayaan masarkat sudah mulai terbentuk sudah adanya BUMDES berupa teransfortasi laut untuk memudahkan masarkat jika ingin kepasar yang ada di kecamatan “kita sudah ada tranfortasi laut yaitu kapal ketek untuk membntu masarakat agar bisa mudah klo mau maen atau kepasar yang ada di kecamatan”.¹⁰⁰ Pungkas kepala pekon kuta kakhng bapak muzanni

Pekon Tanjung jati merupakan salah satu pekon yang ada di kecamatan cuku balak di pekon tanjung jati pendamping desa Membina aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer). Usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah Desa tentang komputer sangatlah penting, karena pada zaman moderen ini untuk urusan kesekretariatan dan semacamnya menggunakan komputer. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDDes dan laporan Desa lainnya tidak lagi menggunakan mesin tik melainkan menggunakan komputer dengan aplikasi microsoft Woard, Excel, power point dan lainnya. Masyarakat Desa harus faham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, hal ini di benarkan oleh bapak irwansyah selaku kepala pekon tanjung jati “disini sering di adakan pelatihan penggunaan komputer tentukan sekarang ini aparat harus bisa komputer kalo gak paham ya ghimana mau nyusun laporan pertanggung jawaban, bisa gawat saya kalo aparat saya gak bisa komputer haha”¹⁰¹

⁹⁹ Bapak Marbawi Kepala [Ekon Sawang Balak Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2019, Pukul 13.30.

¹⁰⁰ .Bapak Muzanni Kepala Pekon Kuta Kakhang Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2029, Pukul 15.00

¹⁰¹ ,Bapak Irwansyah Kepala Pekon Tanjung Jati Wawancara Dengan Penulis, 19 Juni 2019, Pukul 11.00

Menurut bapak Sugiarto kepala pekon tengor, pendamping desa juga harus ikut andil dalam musawarah desa” Pendamping juga di libatkan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.”¹⁰² Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pendamping desa bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan yang ada di pekon wayrilau yang pekonnya di pinggir pantai. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini di ungkapkan oleh kepala pekon wayrilau bapak muslihan “berbaur dengan maasarakat dong masa pendamping tidak bergaul diakan harus tau keluhan daripada masarakat kita ini”¹⁰³

¹⁰² .Bapak Sugiarto Kepala Pekon Tengor Wawancara Dengan Penulis , 19 Juni 2019, Pukul 14.00

¹⁰³ Bapak Muslihan Kepala Pekon Wayrilau Wawancara Dengan Penulis, 20 Juni 2019 Pukul 11.30

Pendamping desa juga sering mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di pekon pekondoh. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendamping Desa melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya pendamping Desa berbincang-bincang (berdiskusi) dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk menemukan peluang yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di pekon pekondoh. Hal ini di benarkan oleh bapak Yuzarni kepala pekon pekondoh “upaya pendampingan sering kita lakukan dengan berdiskusi untuk menambah wawasan dan menggali potensi pada masarakat yang ada di pekondoh ini”.¹⁰⁴

Hal ini juga di lakukan di pekon kejadian lom untuk meningkatkan pemberdayaan masarakat pendamping desa melakukan diskusi dengan kelompok tani, hal ini di sampaikan oleh bapak mulkanzen selaku kepala pekon kejadian lom “kelompok tani disini sering berdiskusi dengan pendamping upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masarakat dalam sektor pertanian karna memang kita di kejadian lom ini fokus terhadap peningkatan pemberdayaan pertanian”.¹⁰⁵

pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin bergantung

¹⁰⁴ . Bapak Yuzarni Kepala Pekon Pekondoh Wawancara Dengan Penulis , 20 Juni 2019, Pukul 14.00

¹⁰⁵ Bapak Mulkanzean Kepala Pekon Kejadian Lom Wawancara Dengan Penulis, 20 Juni 2019, Pukul, 16.00

kepada berbagai program pemberian. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa pemberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui peranya mendampingi pemerintah dan melakukan pemberdayaan masyarakat juga pasti mengalami kedua faktor tersebut Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan

faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.

Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah kecamatan dan respon positif dari pekon dan warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Bapak Firmando Huda Utama menyampaikan “Respon dari pemerintah kecamatan sangat baik ya, pak Camat beserta jajaran pemerintah kecamatan sangat terbuka dan sangat-sangat bersemangat untuk memberikan kemajuan terhadap Desa mereka.”¹⁰⁶

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Desa di Pekon ialah, keterbukaan dari pemerintah kecamatan yang menyambut baik kehadiran Pendamping Desa pemberdaya sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa pemberdaya dengan Pemerintah kecamatan baik bapak Camat, Sekcam, Bendahara, dan jajaran yang lain juga. Sehingga mempermudah proses Pendampingan dan memperlancar Pendamping Desa dalam menjalankan Perannya.

Bapak Muplihan Kepla Pekon Banjar Manis menyatakan “kalau menurut kami ya, cukup bagus ada pemantauan tidak sewenang-wenang kami kan. Ya kerjasama kami selama ini ya..bisa dikatakan kerjasama gitu, yang jelas apapun kegiatan mereka turun apapun kekurangan SPJ ataupun yang lainnya itu juga kerjasama ya

¹⁰⁶ Fernando Huda Utama, Pendamping Desa Pemberdaya Wawancara Dengan Penulis, *Opcit*

kamilah pekon terutam dengan jurutulis dan yang lainnya cukup baguslah kerjasamanya selama ini...”¹⁰⁷

Respon positif juga dari pekon kacamarga pekon membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan Desa yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Pekon hal ini disampaikan oleh kepala pekon bapak Rusi Harto “kami pekon kacamarga khususnya slalu membuka diri untuk orang-orang yang ingin melakukan perubahan apa lagi kalo pendamping inikan printah undang-undang juga”.¹⁰⁸

Setiap pekon merepon dengan baik atas hadirnya pendamping salah satunya juga pekon suka padang pekon yang dipimpin oleh bapak, amir beliau mengungkapkan terimakasih kepada pemerintah telah memberikan solusi dan membntu desa mewujudkan cita cita desa,”kami ucapkan terimakasih lah kepada pendamping ini semoga saja slalu maksimal kedepannya”¹⁰⁹

. Bapak Firmando Huda Utama mennyampaikan “Untuk masyarakat sendiri bisa saya katakan cukup menerima dengan baiklah, terlihat dari keaktifan mereka, semangat mereka untuk mencari perubahan yang lebih baik.”¹¹⁰ Bapak Rusdi S.E menuturkan “kami bersyukurlah dan merasa sangat senang sekalilah dengan adanya Pendamping Desa ini. Kami merasa sangat terbantu dan kami sangat

¹⁰⁷Muflihan , Kepala Pekon Banjakh Manis Wawancara Dengan Penulis 22 Juni 2019, Pukul 10.00

¹⁰⁸ Bapak Rusi Harto, Kepala Pekon Kacamarga Wawancara Dengan Penulis 22 Juni 2019, Pukul 13.00

¹⁰⁹ Bapak Amir, Kepala Pekon Sukapadang Wawancara Dengan Penulis 23 Juni 2019, Pukul 13,00

¹¹⁰Fernando Huda Utama, Pendampingl Desa Pemberdaya Wawancara Dengan Penulis , *Op.Cit*

senang bahwa pemerintah memperhatikan kami melalui pengadaan Pendamping Desa yang membantu dalam pembangunan di Pekon yang ada dikecamatan cukuh balak.¹¹¹

Faktor yang dianggap sebagai penghambat oleh Pendamping Desa dalam menjalankan perannya adalah, Pendamping Desa pemberdaya yang berkedudukan di kecamatan atau yang dikenal dengan Pendamping Desa pemberdaya di kecamatan cukuh balak berjumlah satu orang yaitu Firmando Huda Utama, beliau ditugaskan untuk mendampingi 20 desa dalam satu kecamatan. Mendampingi 20 desa dalam satu kecamatan dengan jarak pekon yang relatif, terbagi menjadi 3 wilayah wilayah pertama di kecamatan wilayah kedua di marga pertiwi wilayah ketiga di daerah pulau untuk turun kelapangan harus menggunakan prahu melewati laut lepas sehingga efisiensi waktu sangat sulit untuk dibagi.

Bapak Fathul kepala pekon pampangan menyampaikan beberapa kendala yang hampir keseluruhan pekon mengalami kendala yang sama efektif waktu, sumberdaya manusia, serta jarak tempuh yang jauh yang sangat dominan menjadi kendala “kalo hambatan sih sebenarnya lebih kepada keefektifan waktu dan sumberdaya manusianya 1 pendamping lokal desa membawahi 4 pekon ini kurang kondusif apa lagi kita desa ini sering melakukan kegiatan itu secara bersama-sama agak sulit bagi pendamping untuk hadir kami sih maklum”.¹¹²

Bapak Fernando Huda Utama menyampaikan “Kalo hambatan sih sebenarnya, semua kegiatan itu pasti ada hambatannya ya, hanya tergantung kecil besarnya hambatan. Kalau saya secara pribadi yang menjadi kendala terlalu banyak dan luas

¹¹¹ Rusdi S.E, Camat Kecamatan Cukuh Balak, *Op.Cit*

¹¹² Bapak Fathul Helmi, Kepala Pekon Pampangan Wawancara Dengan Penulis 24 Juni 2019 Pukul 09.00

Desa-Desa yang harus saya dampingi, yaitu 20 Desa, itupun saya hanya dibantu oleh empat orang pendamping lokal desa.. saya akui itu kurang efektif ,harapannya pemerintah bisa lebih memperhatikan pendamping dalam pelaksanaan tugas karna tugas pendampingan harus maksimal guna mewujudkan masarkat desa yang unggul dan mandiri.¹¹³

Menurut keterangan Bapak Thoriq Iqbal, selaku pendamping lokal desa, kendala yang dialami adalah medan dan jarak tempuh setiap desa, “ saya mendampingi empat desa mas, yaitu pekon Tengor, Pekon Way Rilau,Pekon Tanjung Raja dan Pekon Tanjung Jati. Jarak tempuhnya ini ya agak lumayan jauh mas kalau sendirian, apalagi kita ga ada transport, hehehe” tuturnya.¹¹⁴

Keterangan senada juga disampaikan oleh bapak Apriyantoni, selaku pendamping lokal desa yang membawahi pekon Pampangan, Pekon Kaca Marga, Pekon Suka Padang, dan Pekon Kejadian Lom. Dipendampingan pekon ini, yang dikeluhkan relatif sama, yaitu jarak tempuhnya. Selain itu empat pekon tersebut merupakan pekon padat penduduk, yang penduduknya mayoritas pekerja tani, sehingga dalam merealisasikan program-program pendampingan desa dalam pemberdayaan masyarakat agak sedikit lambat, “ masyarakat disini rata-rata petani pak, jadi ya gitu... tau lah sendiri lah petani kalo ke kebun berangkat pagi pulang sore, jadi utuk pemberdayaan masyarakatnya disini agak terkendala. Karna Cuma satu badan pak di bagi empat pekon, heheheh “ ungkapny.¹¹⁵

¹¹³ Fernando Huda Utama, Pendamping Desa Pemberdaya Wawancara Dengan Penulis, *Op.Cit*

¹¹⁴ . Bapak Thorik Iqbal, Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, *Opcit*

¹¹⁵ .Bapak Apriantoni Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, *Opcit*

Dikecamatan cukuh balak, ada beberapa pekon yang letaknya berada di pulau. Menurut informasi yang penulis dapatkan ada empat pekon yang berada dipulau, yaitu Pekon Sawang Balak, pekon Suka Banjar, Pekon Kuta Kakhang, dan Pekon Kakhang Buah. Ke empat tersebut hanya difasilitasi satu Pendamping Lokal Desa. Sedangkan akses untuk menempuh setiap pekon tersebut hanya di tempuh melalui jalur laut. Hal itulah yang menjadi penghambat terealisasinya program pendamping desa.

Menurut keterangan Hendriyansyah, pendamping lokal desa keempat pekon tersebut, pekon-pekon yang ada dipulau merupakan pekon yang paling susah diakses, selain karna akses jalan yang hanya bisa ditempuh lewat jalur laut, koneksi sinyal Handphone juga relatif susah. “ saya dapet jatah pekon yang sangat luar biasa,” ungkapnya, “ akses untuk kesana itu pak hanya bisa lewat laut, dan hanya mengandalkan dari para petani yang mau berangkat kesana, tidak ada perahu yang rutin berangkat kesana, jadi ya gitu pak, kalo pas waktunya pendampingan tapi gak ada perahu yang berangkat, ya terpaksa harus ditunda nunggu besok, hehe. Dan sinyal pak, duuuuhh susah banget”¹¹⁶ Tambahnya

Faktor penghambat yang lainya ialah jarak dan uang oprasional dalam melaksanakan tugas pendamping tidak ada uang transpot tidak seperti TA yang berkedudukan di kabupaten, karna untuk berkeliling desa selama tugas pendampingan ini menghabiskan uang yang tidak sedikit. Hal itu disampaikan oleh Liskhori selaku pendamping lokal desa di pekon Pekon Doh, Putih Doh, Banjar Manis dan Tanjung Betuah.

¹¹⁶ .Hendriansyah Pendamping Lokal Desa Wawancara Dengan Penulis, *Opcit*

Selain beberapa pekon diatas, ada empat pekon yang tidak mendapat fasilitas desa karna mengundurkan diri. Hal itu disampaikan oleh Firmando Huda Utama, Pendamping desa kecamatan Cukuh Balak. “ ada empat pekon yang sekarang kosong belum ada pendamping lokal desanya, yaitu pekon Banjar negri, pekon sukaraja, pekon Gedung, dan Pekon Kubu Langka”. Ungkapnya. Menurutnya, pendamping lokal desa di empat pekon tersebut mengundurkan diri dan sampai sekarang belum ada yang menggantikanya.

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang menghambat terlaksananya program pendamping desa:

- a. Terbatasnya pegawai pendamping desa, karna satu pendamping desa harus mendampingi lebih dari 3 desa.
- b. Jarak tempuh pegawai lokal desa, terutama akses untuk turun langsung ke setiap pekon, karna rata-rata para pendamping desa bukan orang asli yang berdomisili di pekon tersebut.
- c. Gaji para pendamping desa, hal ini dikarenakan bahawa para pendamping desa hanya mendapatkan gaji pokok, tidak ada uang transport dan uang tunjangan.

BAB IV

ANALISIS

A. Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Terhadap Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Secara tegas tugas pendamping desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa pada pasal 11 dan 12. Dalam hal ini Pendamping Desa di tugaskan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di kecamatan Cukuh Balak peran pendamping desa dalam melakukan tugas sesuai dengan undang-undang, sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pendampingan seperti :

- a. Jarak tempuh desa dampingan, rata rata pendamping desa berasal dari luar daerah desa yang didampingi, ini menjadi salah satu kendala yang dirasakan pendamping, jauhnya desa dampingan dari tempat tinggal pendamping.
- b. Banyaknya pekon yang harus di dampingi, pendamping desa pemberdaya yang berkedudukan di kecamatan membawahi 20 desa dengan di bantu oleh pendamping lokal desa sebanyak 4 orang, 1 pendamping lokal desa membawahi 5 desa, tugas mendampingi tidak akan maksimal karna terlalu banyak desa yang harus di dampingi, sementara program pemberdayaan di lakukan secara bersamaan.
- c. Efektivitas waktu, desa dalam melakukan musawarah desa sering bersamaan, sementara dalam musawarah besar kehadiran pendamping sangat dibutuhkan bagaimana kemudian pendamping bisa hadir pada 5 desa dalam satu waktu, tentu tidak mungkin, sedangkan dalam persoalan waktu musawarah desa juga

tidak bisa menunggu waktu kosong pendamping karna kegiatan desa harus selalu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

- d. Oprasional pendamping juga menjadi faktor prnghambat dalam pelaksanaan tugas, pendamping desa berkeliling menggunakan oprasional pokok (gaji) tidak ada uang transpot, jika uang pokok ini di gunakan pendamping berkeliling tiap hari maka gaji pendamping akan habis hanya untuk transpot saja. Oleh karna itu sering kali pendamping hadir dalam musawarah besar saja atau melakukan kordinasi via telpon.

B. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Pemberdaya Di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Negara indonesia merupakan negara hukum, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita taat dan patuh terhadap segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya sebagai negara hukum adalah aparat dan warga Negara setiap orang harus bertindak sesuai hukum yang berlaku. Taat dan patuh terhadap setiap aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan manifestasi dari taat terhadap pemerintah.

Kajiannya *siyasah dusturiah* tentang konsep negra hkum mengenal istilah mengenai kewajiban menyampaikan amanah sesuai dengan AI-Quran An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut ;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹¹⁷

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat diarik dua garis hukum yaitu. Garis hukum pertama : manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan.¹¹⁸

Dalam suatu kaidah *piqih* Salah satu kaidah *piqih* mengenal istilah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحِ :

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya.

¹¹⁷ AL-quran dan tarjemah an-Nisa: 58

¹¹⁸ .Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Op.Cit.*, h. 105.74

Pada masa khalifah di bentuk lah *halli wal-‘aqd* yang bertujuan untuk membantu pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan ummad pada masa itu. *halli wal-‘aqd* jika kita lihat di era sekarang tugasnya secara esensi hampir sama dengan pendamping desa dimana sama-sama di bentuk untuk kemaslahatan masyarakat.

Peran pendamping desa dalam mengimplementasikan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan bentuk amanah yang harus disampaikan terhadap masyarakat karna amanah tersebut medatangkan maslahat bagi ummat dan bangsa sesuai dengan kaidah piqih “*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*” Sama halnya di kecamatan cukuh balak peran pendamping sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi belum maksimal.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa seorang pendamping desa dikecamatan cukuh balak secara umum sudah menjalankan kewajibanya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari bentuk amanah yang harus disampaikan terhadap masyarakat karna amanah tersebut medatangkan maslahat bagi ummat. Artinya dalam menjalankan fungsinya, pendamping desa sudah sesuai dengan aturan dan hukum islam, yaitu penyampaian amanah. Dan contoh atau persamaan peran dari pendamping dalam hukum islam memiliki kesamaan dengan *halli wal-‘aqd* yaitu sama-sama di bentuk untuk membantu pemerintah memberi kesejahtran terhadap masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran dan Fungsi pendamping Desa. Peran Pendamping Desa adalah membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dalam pandangan fiqh siyasah Kesesuaian dalam penerapan teori hukum Islam, peran dan fungsi Pendamping desa telah memenuhi syarat (*siyasah dusturiyah*). Dalam melaksanakan peran dan fungsi pendampingan desa merupakan bentuk tugas atau amanah kepada masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap pemimpin yang menerapkan kaidah fikih.

B. SARAN

Setelah mengambil beberapa kesimpulan pada sekripsi ini, penulis ingin menyampaikan saran, kepada seluruh pendamping desa jalankan tugas dan fungsi mu sebaik mungkin, karna tugas mu merupakan tanggung jawab yang harus kalian sampaikan terhadap masyarakat, dan kepada pemerintah agar dapat memberi jaminan dan memfasilitasi peran daripada pendamping karna dengan menjamin kesejahteraan merekalah peran dan fungsi pendamping dapat berjalan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* .
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Adityabakti, 2004) .
- Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia,
- AL-quran dan tarjemah
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*.
- Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo : Dar al-Ansr, 1977).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.).
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, terjemahan Ibrahim Syu'aib, *Etika Agama dan Dunia*.
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, (PT Eresco, Bandung, 1971).
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014,
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan, *Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Mengenai Desa*.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, *Modul Tenaga Profesiaonal Pendamping Lokal Desa (PLD) Program Inovasi Desa (PID)*, (Bandar lampung; 2018).
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab* Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986),
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2011).
- J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Rajawali, 1994),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014).
- MuchtarAffandi, *Ilmu-ilmuKenegaraan*, (Alumni,Bandung,1971),

Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana,2005)

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*,

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987).

Ni"matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta : UII Press, 2005)

Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,*Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Profil Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: RenikaCiptaIlmu, 2002)

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta : Matahari Masa, 1969

TahirAzhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1995)

Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 1

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2001

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Alih Bahasa Kathun Suhadi

Yusuf, Qardhawi, *Fiqih Negara* (Jakarta: Robbani Press,1997).

Zeni Yuserli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa

